



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

e

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.
- (3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA - SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025;

e

- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025;
- i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025;
- o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025;
- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025; dan
- dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

9

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Agustus 2024

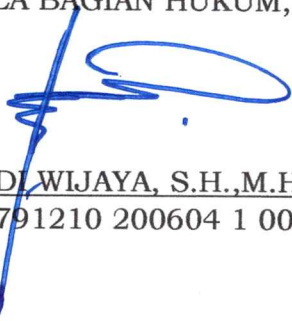
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

19. RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan Renja merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA PD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra PD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Oleh karenanya, penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada dokumen RPJMD dan Renstra yang telah disusun.

Sehubungan dengan perubahan periodisasi dokumen perencanaan, tahun 2025 menjadi tahun transisi dengan periode perencanaan selanjutnya yaitu periode perencanaan tahun 2025 - 2029. Walaupun sebagai tahun transisi, penyusunan Renja Tahun 2025 masih berpedoman Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 dan akan dilanjutkan dengan penyusunan. Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan Yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah. Sedangkan kebijakan pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah pemantapan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 juga disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 630 Tahun 2023);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005 –2025;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Walikota Blitar No. 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud & Tujuan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021–2026 serta disusun mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Adapun tujuan di susunnya Renja ini adalah :

- a) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025
- b) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025
- c) Sebagai sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, capaian target Renstra s/d tahun 2024, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi PD, review terhadap Rancangan Awal RKPD serta penelaahan usulan masyarakat / pemangku kepentingan.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta daftar program dan kegiatan tahun 2025.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

Menguraikan tentang garis besar mengenai rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 berdasarkan hasil analisis bab-bab sebelumnya.

BAB V. Penutup

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar serta Pada tahun 2023, program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan indikator capaian target sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Selain itu, pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026, tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode renstra.

Perkiraan tingkat capaian target indikator program dalam Review Renstra PD sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dan perkiraan capaian target tahun 2024 secara singkat sebagai berikut :

Tabel 1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
209.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,75	0.00	81.00	86,17	106,38	81,25	86,17	105,41
209.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	0.00	5.00	5	100	5	10	50,00
209.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	0.00	4.00	4	100	4	8	50,00

209.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	224	0.00	56.00	56	100	56	112	50,00
209.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	20	0.00	5.00	5	100	5	10	50,00
209.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100.00	0.00	100.00	100	100	100	100	#VALUE!
209.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	0.00	3.00	3	100	1	4	80,00
209.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	392	0.00	98.00	98	100	98	196	50,00
209.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0.00	2.00	2	100	1	3	75,00
209.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	0.00	3.00	3	100	2	5	50,00

209.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	0.00	6.00	5	83,33	3	8	66,67
209.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	0.00	5.00	5	100	4	9	56,25
209.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
209.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	288	0.00	72.00	72	100	72	144	50,00
209.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	224	0.00	62.00	85	137,1	56	141	62,95
209.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	864	0.00	216.00	216	100	216	432	50,00
209.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	0.00	13.00	13	100	13	26	50,00
209.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	120	0.00	42.00	42	100	30	72	60,00

	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
209.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	128	0.00	62.00	62	100	32	94	73,44
209.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	kcal/ kapita/ hari	2200	0.00	2200.00	2.888,21	131,28	2200	131,28	5,97
		Angka konsumsi energi per kapita	kcal/ kapita/ hari	2133,34	0.00	2010.00	2.149,00	106,92	2051	106,92	5,01
209.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	84	0.00	100.00	100	100	84	100	119,05
209.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	4	0.00	3.00	3	100	2	5	125,00
209.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein	gr/ kapita/ hari	57	0.00	57.00	66,2	116,14	57	116,14	203,75
209.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	8	0.00	4.00	4	100	4	8	100,00
209.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00

209.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	%	16	0.00	13.83	63,82	461,46	14,52	461,46	2884,13
209.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	kali	10	0.00	2.00	2	100	2	100	1000,00
209.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	8	0.00	3.00	3	100	3	6	75,00
209.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar (%)	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
209.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	%	100	0.00	67.00	68,18	101,76	100	101,76	101,76
209.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
325.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	%	15,82	0.00	2.92	21,05	720,89	4,24	720,89	4556,83
		Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	%	6,9	0.00	15.07	16,33	108,36	15,07	108,36	1570,43
325.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	%	38,58	0.00	29.67	44,09	148,6	32,64	148,6	385,17
325.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	4	0.00	1.00	1	100	2	3	75,00

325.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	20	0.00	1.00	1	100	5	6	30,00
325.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	%	3,26	0.00	1.48	4,52	305,41	2,08	305,41	9368,40
325.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
325.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	160	0.00	30.00	30	100	40	70	43,75
325.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan	juta rupiah	35.267	0.00	34230.00	34.230,00	100	34572	100	0,28
325.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	%	43	0.00	17.39	17,39	100	26,09	100	232,56

325.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Usaha	8	0.00	2.00	2	100	2	4	50,00
325.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	kg/ kapita/ tahun	19	0.00	18.40	21	114,13	18,6	114,13	600,68
325.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Usaha	40	0.00	40.00	40	100	20	60	150,00
325.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	40	0.00	20.00	20	100	10	30	75,00
327.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar	%	29,03	0.00	19.35	50	258,4	22,58	258,4	890,11
		Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	%	31,48	0.00	20.37	97,2	477,17	24,04	477,17	1515,79
		Persentase sarana pertanian yang tersedia	%	75	0.00	72.00	72,84	101,17	73	101,17	134,89

327.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	%	100	0.00	40.00	41,67	104,18	60	104,18	104,18
327.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	0.00	3.00	3	100	2	5	125,00
327.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	%	50	0.00	20.00	27,58	137,9	30	137,9	275,80
327.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	16	0.00	2.00	2	100	3	5	31,25
327.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	%	100	0.00	100.00	100	100	100	100	100,00
327.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Laporan	8	0.00	2.00	2	100	2	4	50,00
327.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	%	70	0.00	55.00	95,1	172,91	60	172,91	247,01

327.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	%	100	0.00	51.39	69,43	135,1	51,9	135,1	135,10
		Persentase produk RPH yang dijamin ASUH	%	52,94	0.00	100.00	100	100	100.00	100	188,89
327.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	%	100	0.00	25.00	75	300	100	300	300,00
327.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	4	0.00	1.00	1	100	2	3	75,00
327.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Presentase prasarana RPH yang ditingkatkan	Persen	90	0.00	69.90	83,33	119,21	70	119,21	132,46
327.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	0.00	3.00	3	100	3	6	200,00
327.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	%	100	0.00	100.00	100	100	100.00	100	100,00
		Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	%	72,22	0.00	44.44	64,28	144,64	55,56	144,64	200,28
		Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	%	52	0.00	40.00	48	120	44	120	230,77

327.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	kasus	0	0	0	0	100	0	0	100,00
327.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	90	0.00	2.00	2	100	0	2	2,22
		Jumlah kader zoonosis	orang	90					42	42	46,67
327.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	%	71	0.00	63.00	80	126,98	67	126,98	178,85
327.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	16	0.00	3.00	4	133,33	5	9	56,25
327.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	%	48	0.00	36.00	105,46	292,94	40	292,94	610,29
327.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	0.00	1.00	1	100	1	2	100
		Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	unit usaha	60					21	21	35,00
327.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan	Prosentase KIE yang yang terlaksana	%	100	0.00	75.00	80	106,67	100	106,67	106,67

	Teknis Kesejahteraan Hewan										
327.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	2	0	2	3	150	0	3	150
		Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	unit usaha	24					8	8	33,33
327.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	%	100	0.00	100.00	100	100	100.00	100	100,00
327.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	%	33	0.00	13.33	17	127,53	13	127,53	386,45
327.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	400	0.00	100.00	100,11	100,11	100	200,11	50,03
327.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	%	53,85	0.00	33.00	34,62	104,91	41,66	104,91	194,82
		Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	%	58,33	0.00	33.00	66,67	202,03	44,62	202,03	346,36
327.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	%	30	0.00	15.00	45	300	20	300	1000,00

327.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	4	0.00	1.00	1	100	2	3	75,00
327.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	rekomen dasi	4	0.00	1.00	4	400	1	5	125,00
327.06.2.02.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	8	0.00	2.00	2	100	2	4	50,00
327.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	rekomen dasi	4	0.00	1.00	2	200	1	3	75,00
327.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	4	0.00	1.00	1	100	1	2	50,00
327.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	%	23,81	0.00	9,52	10,14	106,51	14,29	14,29	104,29
		Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	%	38,82	0.00	25.00	36,13	144,52	30,56	36,13	93,07
		Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	%	0,93	0.00	0.93	2,78	298,92	0,93	2,78	298,92
327.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	%	50	0.00	35.00	73,66	210,46	40	210,46	420,92

327.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	3	0.00	3.00	3	100	3	6	200,00
327.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	84	0.00	31.00	34	109,68	27	61	72,62
327.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	3	0.00	3.00	3	100	3	6	200,00

Rata-rata capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kinerja yang masih di bawah target yang ditetapkan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia tercapai sebesar 83,33% dari target sebesar 100%. Target indikator tidak tercapai karena tidak bisa dilaksanakannya pengadaan kamera dan stabilizer yang terkendala tidak tersedianya produk sesuai dengan anggaran yang tersedia dan telah mempunyai sertifikat TKDN. Sedangkan beberapa target kinerja tercapai sangat tinggi yaitu lebih dari 120 %. Hal ini disebabkan karena :

1. Beberapa indikator program dan kegiatan (persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis, pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan, persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar, persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak, persentase peternak yang dibina, persentase obat hewan yang sudah teregister, persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik, persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar, persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia, persentase unit usaha produk hewan yang dibina, persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis, jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis, persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital, persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani, persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani) memiliki target yang terlalu rendah sehingga perlu dilakukan penyesuaian target untuk perencanaan selanjutnya.
2. Untuk indikator persentase balita rawan pangan yang tertangani, persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT dan persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM mencapai target lebih dari 120% karena meningkatnya ketersediaan anggaran dan perubahan standar harga serta besaran bantuan yang diberikan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menangani satu urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu Urusan Pangan, serta dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pertanian berkewajiban memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai IKU PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Gambaran kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pencapaian target pelayanan PD tahun 2023 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

No.	Indikator		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Skor PPH Konsumsi	Angka	✓		86,25	86,5	86,75	87	86,31	87,7	86,75	87	Tercapai 101,39% , kategori Berhasil
2	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Kwintal			198.186,93	198.206,74	198.325,67	198.444,66	245.151,00	240.477,00	198.325,67	198.444,66	Tercapai 121,33%, kategori Sangat Berhasil
3	Produksi hasil peternakan	Kwintal			84.322	84.651	84.828	85.042	104.984,00	100.122,81	100.123	100.125	Tercapai 118,28%, kategori Sangat Berhasil
4	Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	Kwintal		✓	2.404,80	2.464,92	2.489,33	2.519,10	2412,4	2.485,00	2.489,33	2.519,10	Tercapai 100,81%, kategori Sangat Berhasil
5	Produksi hasil budidaya ikan hias	ekor			4.698.482	4.719.626	4.740.864	4.762.198	4.699.324,00	4.719.733	4.740.864	4.762.198	Tercapai 100%, kategori Sangat Berhasil
6	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	%		✓	44,83	45,33	45,83	46,83	142,14	107,4	45,83	46,83	Tercapai 236,93% kategori Sangat Berhasil
7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi dan jagung)	ton/ ha		✓	18,64	18,65	18,66	18,68	21,34	21,72	18,66	18,68	Tercapai 116,46% kategori Sangat Berhasil
8	Persentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular	%		✓	5	5	5	5	-44,07	69,41	5	5	Tercapai 1388,20 %, kategori sangat berhasil.

Secara umum capaian kinerja pelayanan pada tahun 2023 mencapai 100% atau lebih. Bahkan sebagian besar telah memenuhi target pada tahun 2025 yang merupakan tahun akhir Renstra. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular mencapai 69,41% pada tahun 2023 atau sebesar 1.388,20% dari target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan vaksinasi secara masif mampu menurunkan angka kejadian penyakit terutama PMK dan LSD yang pada tahun 2022 menjadi wabah penyakit pada ternak sapi di Kota Blitar. Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan adalah :

1. Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan.
2. Penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis.
3. Peningkatan pengawasan produksi hasil peternakan ternak.
4. Peningkatan kapasitas SDM pertanian dan perikanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perwali Kota Blitar No. 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dalam struktur organisasi baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan hasil penilaian kewenangan, yaitu Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan yang menangani sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan; Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan menangani sub sektor ketahanan pangan dan perikanan; dan Bidang Peternakan menangani sub sektor peternakan. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.

Pembangunan Pertanian, Pangan dan Perikanan berdasarkan Rancangan RKP Tahun 2025 masuk pada Prioritas Nasional 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru”. Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui strategi :

1. Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tatakelola dan rantai nilai hasil pertanian.
3. Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama disaat panen raya.
4. Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
5. Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana

produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)

6. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal
7. Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan
8. Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Sedangkan isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke depan antara lain :

1. Belum meratanya kemandirian pangan sehingga mengakibatkan kerentanan masyarakat terhadap fluktuasi harga pangan.
2. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan tidak memungkinkan adanya ekstensifikasi budidaya.
3. Belum optimalnya daya dukung lahan terhadap peningkatan produksi pertanian.
4. Perdagangan bebas komoditas pertanian dan perikanan mensyaratkan adanya standarisasi dan diversifikasi produk untuk mampu bersaing.
5. Masih kurangnya peningkatan tata kelola administrasi perangkat daerah (perencanaan dan akuntabilitas kinerja) yang efektif dan efisien.

Dalam pengembangan pelayanan peluang yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain :

1. Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dengan instansi-instansi vertikal terkait.
2. Terjalannya hubungan yang baik antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan mitra kerja (petani, pelaku agribisnis, penyedia saprodi, dll.)
3. Antusiasme petani terhadap perkembangan-perkembangan baru di bidang pertanian yang diakomodasi dalam program-program Dinas.
4. Tanggapan positif petani terhadap isu pertanian berwawasan lingkungan dan isu peningkatan daya saing produk pertanian.
5. Dukungan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui program/kegiatan bidang pertanian, perikanan dan pangan yang selaras dengan program/kegiatan di Kota Blitar.

Berdasarkan RKP Tahun 2025, analisis kinerja pelayanan daerah sampai dengan 2023, isu strategis dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, maka strategi pencapaian target kinerja pada tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan produksi tanaman pangan lebih difokuskan pada peningkatan daya dukung / kapasitas lahan pertanian
2. Peningkatkan pematuan harga pangan dan stok pangan
3. Pengendalian alih fungsi lahan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja.
5. Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan serta memperluas jangkauan pemasaran
6. Peningkatan diversifikasi komoditas pertanian

Sedangkan kebijakan yang dilaksanakan adalah :

1. Menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis terpadu dan berkelanjutan.

2. Optimalisasi pemantauan harga pangan dan stok pangan melalui penyusunan SOP dan koordinasi dengan pihak terkait (Satgas Pangan).
 3. Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan.
 4. Koordinasi lintas sektoral dalam penentuan dan pelaksanaan LP2B.
 5. meningkatkan kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja dengan pengembangan aplikasi data pangan, pertanian dan perikanan serta sosialisasi dan review kinerja perangkat daerah.
 6. Meningkatkan standar mutu produk hasil perikanan dan pertanian.
 7. Meningkatkan akses pasar produk hasil pertanian dan perikanan.
 8. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pertanian dan perikanan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD 2021 - 2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kota Blitar tahun 2025 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5 Angka	9.028.925.320	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5 Angka	8.985.496.976	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	177.824.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	101.927.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.090.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.927.200	Penyesuaian standart harga
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	167.734.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	91.999.900	Penyesuan rincian obyek belanja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	6.456.155.374	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	6.629.955.509	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	6.453.385.374	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	6.627.185.509	Penyesuaian kebutuhan untuk ASN baru
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	2.770.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	2.770.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	125.090.472	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	127.352.300	Penyesuaian rincian belanja dan standar harga
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	38.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37.500.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	98 Orang	87.090.472	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	98 Orang	89.852.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Semua Kel/Desa	Perundang-Undangan				Semua Kel/Desa	Perundang-Undangan			
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	352.059.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	326.427.500	Penyesuaian standart harga
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.859.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.849.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	46.266.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.022.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25.243.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	24.692.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.181.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.240.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.278.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.278.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	14.940.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	14.940.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	199.980.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	180.093.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.312.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.312.500	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 Persen	23.418.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 Persen	114.989.300	Penambahan sub kegiatan dan standar harga
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.119.300	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	18.240.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23.418.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.630.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	13.000.000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 Persen	1.433.345.535	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 Persen	1.453.902.195	Penyesuaian standart harga
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	194.617.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	164.617.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.238.728.335	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.289.284.995	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 Persen	461.030.739	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 Persen	230.943.072	Penyesuaian rincian obyek belanja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	110.808.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	109.156.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	58.171.900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	58.030.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	292.050.839	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	63.756.572	
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka ketersediaan energi perkapita/hari	2200 kkal/kap/hari	114.775.500	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka ketersediaan energi perkapita /hari	2200 kkal/kap/hari	151.588.100	
			Angka konsumsi energi per kapita	2150 kkal/kap/hari				Angka konsumsi energi per kapita	2150 kkal/kap/hari		
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100 angka	2.923.600	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100 angka	28.840.000	Penambahan sub kegiatan
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	0 Unit	0	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani	3 Unit	25.916.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Indonesia yang Dikembangkan			
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	2.923.600	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	2.923.200	
2.2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Angka konsumsi protein	57 gr/kap/thari	111.851.900	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Angka konsumsi protein	57 gr/kap/thari	122.748.100	Penyesuaian standar harga
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	58.600.100	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	69.496.400	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	53.251.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	53.251.700	
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase balita rawan pangan yang tertangani	15.24 Persen	53.205.700	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase balita rawan pangan yang tertangani	15.24 Persen	53.203.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	2 kali	53.205.700	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	2 kali	53.203.600	Penyesuaian standart harga
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	53.205.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	53.203.600	
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Tingkat keamanan pangan segar	100 Persen	10.250.200	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Tingkat keamanan pangan segar	100 Persen	10.249.700	
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	100 Persen	10.250.200	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	100 Persen	10.249.700	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.250.200	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.249.700	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	5,57 Persen	324.121.578	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	5,57 Persen	299.114.300	
			Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	15,82 Persen				Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	15,82 Persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	35,61%	163.378.700	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	35,61%	138.375.700	Pengurangan rincian obyek belanja
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	111.230.300	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	86.227.500	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	52.148.400	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	52.148.200	
5.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	2,67%	160.742.878	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	2,67%	160.738.600	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.788.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.787.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	120.000.128	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	119.996.200	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Unit	34.954.750	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Unit	34.954.600	
6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Volume penjualan hasil olahan perikanan	34918 juta rupiah	2.314.934.955	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Volume penjualan hasil olahan perikanan	34918 juta rupiah	110.974.300	
6.1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	34,78%	25.622.200	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	34,78%	25.622.200	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	25.622.200	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	25.622.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	18,8 kg/kapita/ tahun	2.289.312.755	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	18,8 kg/kapita/ tahun	85.352.100	Pengurangan rincian obyek belanja (revitalisasi PIAIH)
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10 Ton	55.352.100	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ton	55.352.100	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	2.233.960.655	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	30.000.000	
7.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase sarana pertanian yang tersedia	74%	800.774.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase sarana pertanian yang tersedia	74%	539.227.600	
			Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	27,78%				Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	27,78%		
			Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)	25,81%				Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar)	25,81%		
7.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	80%	709.595.600	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	80%	448.050.000	Penyesuaian rincian obyek belanja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	455.842.900	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	373.050.000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	253.752.700	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	75.000.000	
7.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang dibina	40%	53.535.700	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang dibina	40%	53.535.300	Penyesuaian standar harga
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	53.535.700	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	53.535.300	
7.3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	100%	32.850.500	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten /Kota		Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	100%	32.850.200	Penyesuaian standar harga
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	23.928.700	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/	2 Laporan	23.928.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Tanaman Skala Kecil			
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	8.921.800	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	8.921.700	
7.4	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase obat hewan yang sudah teregister	65%	4.792.200	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase obat hewan yang sudah teregister	65%	4.792.100	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	4.792.200	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	4.792.100	
8.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	52%	1.946.245.154	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	52%	623.037.292	
			Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	100%				Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	100%		
8.1	Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	100%	137.288.400	Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	100%	108.222.592	Penyesuaian rincian belanja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	2.120.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	84.400.000	
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	135.168.400	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	1 Dokumen	23.822.592	
8.2	Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase prasarana pertanian yang tersedia	70%	1.808.956.754	Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase prasarana pertanian yang tersedia	70%	514.814.700	Penyesuaian target dan rincian belanja
			Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan Persentase prasarana pertanian yang tersedia	80%				Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan Persentase prasarana pertanian yang tersedia	80%		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	611.250.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	4.950.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	225.227.520	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	98.827.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	11.230.614	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	22.275.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	611.250.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	203.750.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	349.998.620	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	185.012.200	
9.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	48 Persen	227.805.640	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	48 Persen	241.503.800	
			Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	100 persen				Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	100 persen		
			Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	61,11 persen				Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	61,11 persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
9.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	0 Angka	41.055.400	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten /Kota		Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	0 Angka	49.134.900	Penyesuaian standar harga
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader zoonosis	42 Orang	41.055.400	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader zoonosis	42 Orang	49.134.900	
9.2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	69%	146.104.940	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	69%	153.876.300	Penyesuaian rincian belanja
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	29.015.850	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	26.812.100	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan	117.089.090	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan	127.064.200	
9.3	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	44%	28.331.500	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	44%	27.464.700	Penyesuaian standar harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	8.619.300	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	8.811.000	
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	21 Unit Usaha	19.712.200	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	21 Unit Usaha	18.653.700	
9.4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Prosentase KIE yang yang terlaksana	100%	12.313.800	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Prosentase KIE yang yang terlaksana	100%	11.027.900	Penyesuaian standar harga
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8 Unit	12.313.800	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8 Unit	11.027.900	
10.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	100%	16.041.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	100%	17.675.000	
10.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	13%	16.041.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	13%	17.675.000	Penyesuaian standar harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	16.041.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	17.675.000	
11.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	50%	39.335.250	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	50%	18.184.600	
			Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	49,23%				Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	49,23%		
11.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	20 unit	28.012.400	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	20 unit	7.649.400	Penyesuaian rincian belanja
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	28.012.400	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	7.649.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
11.2	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	1 rekomendasi	5.524.800	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	1 rekomendasi	5.524.600	
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2 Laporan	5.524.800	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2 Laporan	5.524.600	
11.3	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1 rekomendasi	5.798.050	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1 rekomendasi	5.010.600	Penyesuaian rincian belanja
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	5.798.050	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1 Laporan	5.010.600	
12.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	33.33 Persen	1.627.139.800	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	33.33 Persen	1.614.072.200	
			Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	19.05 Persen				Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	19.05 Persen		
			Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	0.93 Persen				Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	0.93 Persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
12.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	45%	1.627.139.800	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	45%	1.614.072.200	Penyesuaian rincian belanja
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	72.465.800	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	59.124.600	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Unit	1.550.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Unit	1.550.000.000	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	4.674.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	4.947.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak saja bersifat top down melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan PD.

Pada Tahun 2024 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka PD akan melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang telah diverifikasi dan ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Blitar

No.	Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	POKIR DPRD 2025							
1	Pembangunan saluran irigasi sawah	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rt.03 Rw.09 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar	Terbangunnya saluran sawah (JITUT)	240 m'	Diakomodasi dalam RENJA 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan PD di Kabupaten / Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional dan Propinsi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian :

No.	Kebijakan Nasional / Propinsi	Sumber	Keterangan
	A. Nasional		
1.	a) Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio. b) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, ternologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tatakelola dan rantai nilai hasil pertanian. c) Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama disaat panen raya. d) Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional. e) Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (<i>blue food</i>) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) f) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal g) Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan h) Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.	Arah Kebijakan RKP 2025	
2.	a) Terjaganya ketahanan pangan nasional. b) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. c) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. d) Meningkatkan kualitas SDM pertanian. e) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.	Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024	

No.	Kebijakan Nasional / Propinsi		Sumber	Keterangan
3.	a)	Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.	Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2020-2024	
	b)	Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.		
	c)	Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.		
	d)	Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.		
	e)	Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan		
	B. PROPINSI			
1	a)	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan bearagam bergizi seimbang dan aman (B2SA).	Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026	
	b)	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan konsumsi pangan tingkat rumah tangga sekaligus peningkatan pendapatan.		
	c)	Meningkatkan pengawasan PSAT pre market dan post market untuk menjamin peredaran pangan yang aman dikonsumsi.		
	d)	Meningkatkan ketersediaan sarana pertanian seperti benih unggul bersertifikat, alsintan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.		
	e)	Penyediaan infrastruktur pertanian dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura.		
	f)	Optimalisasi pengamanan dan perlindungan tanaman.		
	g)	Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian		
	h)	Peningkatan nilai evaluasi SAKIP melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan , evaluasi dan pencapaian kinerja yang akuntabel.		
2	a)	Meningkatkan Produksi perikanan budidaya	Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	
	b)	Meningkatkan produksi olahan dan akses pasar		
	c)	Meningkatkan produksi benih ikan air payau dan laut		
	d)	Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan		
	e)	Meningkatkan kompetensi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan		

3.2. Tujuan & Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Berdasarkan Perubahan Ketiga Rencana Strategik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 - 2026 serta hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar
Tahun 2025 - 2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	Suatu sistem penilaian yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	74,68	79,25	75,18 (angka)	75,68 (angka)	76,18 (angka)
		Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita	Pangsa pengeluaran pangan adalah perbandingan antara pengeluaran rumah tangga untuk belanja pangan dengan total pengeluaran yang diukur dalam persen	N/A	N/A	42,36 %	42,16 %	41,96 %
1.2	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa.	86,5	87,7	86,75 (angka)	87 (angka)	88,5 (angka)
2.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.	197,81 milyar rupiah	213,52 milyar rupiah	198,8 milyar rupiah	199,79 milyar rupiah	200,79 milyar rupiah
		Nilai Tukar Petani	NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani di bandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.	N/A	N/A	101,67 (angka)	102,17 (angka)	102,67 (angka)
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya a ikan karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan /dijual pembudidaya ikan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan pembudidaya ikan baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk	N/A	N/A	101 (angka)	101,5 (angka)	102 (angka)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
			konsumsi rumah tangga pembudidaya ikan.					
2.1	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Jumlah Produksi tanaman pangan dan hortikultura	- Produksi tanaman pangan adalah hasil panen dari budidaya tanaman pangan yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang yang dibudidayakan pada lahan sawah. - Produksi Hortikultura adalah hasil panen budidaya tanaman sayuran dan buah - buahan baik semusim maupun tahunan yang dibudidayakan pada lahan pekarangan dan lahan sawah.	198.206,74 kwintal	240.477,00 kwintal	198.325,67 kwintal	198.444,66 kwintal	198.563,73 kwintal
		Jumlah Produksi hasil peternakan	Hasil utama peternakan di antaranya daging, susu, dan telur, yang menjadi makanan untuk manusia	84.651,00 kwintal	100.122,81 kwintal	100.123 kwintal	100.125 kwintal	100.126 kwintal
		Jmlah Produksi hasil budidaya ikan konsumsi	- Ikan konsumsi adalah ikan yang berhabitat di air tawar/payau yang sering digunakan sebagai bahan lauk pauk dan sering menjadi pilihan untuk dikonsumsi oleh manusia. - Budidaya ikan konsumsi adalah kegiatan memelihara,membesarkan ikan konsumsi dan memanen hasilnya.	2.464,92 kwintal	2.485,00 kwintal	2.489,33 kwintal	2.519,10 kwintal	2.549,33 kwintal
		Jumlah Produksi hasil budidaya ikan hias	- Ikan Hias adalah jenis ikan yang berhabitat di air tawar maupun air laut yang dipelihara bukan untuk dikonsumsi tapi untuk memberikan nilai estetika/memperindah. - Budidaya ikan hias adalah kegiatan memelihara, membesarkan, membiakkan ikan hias dan memanen hasilnya.	4.719.626 ekor	4.719.733 ekor	4.740.863 ekor	4.762.198 ekor	4.783.627 ekor
2.2	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi hasil pertanian	Nilai produksi hasil pertanian adalah nominal uang yang dihasilkan dari usaha pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dihitung kumulatif dalam satu tahun.	N/A	N/A	92.181.425,08 ribu rupiah	94.025.053,58 ribu rupiah	95.905.554,66 ribu rupiah
		Nilai produksi hasil perikanan	Nilai produksi hasil perikanan adalah nominal uang yang dihasilkan dari usaha pemasaran ikan segar dan omset usaha olahan hasil perikanan yang dihitung kumulatif dalam satu tahun.	N/A	N/A	34.977.794,39 ribu rupiah	35.677.350,27 ribu rupiah	36.390.897,28 ribu rupiah
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	84,71 (A)	84,77 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
3.1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	84,71 (A)	84,77 (A)	84,73 (A)	84,75 (A)	84,77 (A)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar disusun untuk mendukung pencapaian visi Walikota Blitar yaitu untuk mewujudkan Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat Pada tahun 2026. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menggemakan misi Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital yang telah diterjemahkan dalam renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Hal tersebut dimaksudkan juga untuk mendukung program prioritas nasional yaitu untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan.

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja PD tahun 2023 analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap Rancangan Awal RKPD serta hasil telaah terhadap usulan masyarakat, maka ditetapkan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025. Dengan adanya perubahan pada SIPD RI, menyebabkan adanya penyesuaian nomenklatur pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 terdapat 12 program, 30 kegiatan dan 64 sub kegiatan. Lokasi program kegiatan tersebut terdapat di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sananwetan dan Kecamatan Sukorejo dengan sasaran ditujukan kepada masyarakat petani, peternak dan pembudidaya perikanan yang tergabung dalam kelompok dan yang berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah. Sumber pendanaan program dan kegiatan berasal dari dana PAD, DAU, DAK Non Fisik dan DBHCHT. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				12.934.327.468				16.423.340.764
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.471.329.576				10.841.300.529
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				9.471.329.576				10.841.300.529
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81.5 Angka	9.256.291.176			81,75 angka	10.578.745.948
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 Persen	101.944.500			100 Persen	113.702.587
2	09	01	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	9.927.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	11.719.911

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	01	2.01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	92.017.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	101.982.676
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 Persen	6.899.955.509			100 Persen	7.608.788.410
2	09	01	2.02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Orang/bulan	6.897.185.509	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		56 Orang/bulan	7.605.560.998
2	09	01	2.02	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	2.770.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	3.227.412
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 Persen	127.352.300			100 Persen	155.940.061
2	09	01	2.05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	37.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	50.000.000
2	09	01	2.05	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Orang	89.852.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		98 Orang	105.940.061

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 Persen	327.204.300			100 Persen	707.612.967
2	09	01	2.06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.849.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	11.190.558
2	09	01	2.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	41.799.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	227.078.508
2	09	01	2.06	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	24.692.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	121.645.362
2	09	01	2.06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	20.240.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	70.146.136
2	09	01	2.06	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	23.278.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	40.356.266
2	09	01	2.06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Dokumen	14.940.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		72 Dokumen	17.357.429
2	09	01	2.06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Laporan	180.093.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		56 Laporan	199.838.708

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	01	2.06	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.312.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	20.000.000
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 Persen	89.989.300			100 Persen	0,00
2	09	01	2.07	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	36.119.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	-
2	09	01	2.07	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	18.240.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	-
2	09	01	2.07	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	22.630.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	0,00
2	09	01	2.07	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	13.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0 Unit	-
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 Persen	1.453.902.195			0 Unit	1.401.167.811
2	09	01	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216 Laporan	164.617.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	162.439.476
2	09	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	1.289.284.995	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		216 Laporan	1.238.728.335

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 Persen	255.943.072			13 Laporan	591.534.112
2	09	01	2.09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	109.156.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	178.689.994
2	09	01	2.09	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	58.030.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Unit	59.199.256
2	09	01	2.09	000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32 Unit	30.000.000
2	09	01	2.09	000 9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	63.756.572	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	323.644.862
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi perkapita/ hari		2200 kkal/kap/ hari	151.585.100			2200 kkal/kap/ hari	165.314.081
						Angka konsumsi energi per kapita		2150 kkal/kap/ hari				2150 kkal/kap/ hari	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah		100 angka	28.840.000			100 angka	3.428.214
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	25.916.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	-
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.923.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	3.428.214
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein		57 gr/kap/thari	122.745.100			57 gr/kap/thari	161.885.867
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	69.493.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	98.549.604
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	53.251.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	63.336.263
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani		15.24 Persen	53.203.600			16 Persen	82.654.425

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan		2 kali	53.203.600			2 kali	82.654.425
2	09	04	2.02	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	53.203.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	82.654.425
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar		100 Persen	10.249.700			100 Persen	14.586.075
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji		100 Persen	10.249.700			100 Persen	14.586.075
2	09	05	2.01	000 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.249.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	14.586.075
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.462.997.892				5.582.040.235
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				410.088.200				540.811.781

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis		5,57 Persen	299.113.900			6,9 Persen	389.017.415
						Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas		15.82 Persen				15,82 Persen	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan		35.61 Persen	138.375.300			38,58 Persen	128.823.117
3	25	04	2.02	000 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kelompok	86.227.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Kelompok	86.280.410
3	25	04	2.02	000 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kelompok	52.147.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Kelompok	42.542.707
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan		2.67 Persen	160.738.600			3,26 Persen	260.194.298
3	25	04	2.04	000 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.787.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	6.077.410

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	25	04	2.04	000 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	119.996.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	203.718.118
3	25	04	2.04	001 0	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	34.954.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40 Unit	50.398.770
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan		34918 Juta Rupiah	110.974.300			35267 juta rupiah	151.794.366
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu		34.78 Persen	25.622.200			43,48 Persen	50.598.122
3	25	06	2.02	000 2	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Usaha	25.622.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit Usaha	50.598.122
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun		18.8 kg/ kapita/ tahun	85.352.100			19 kg/kapita/ tahun	101.196.244

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	25	06	2.03	000 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ton	55.352.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Ton	50.598.122
3	25	06	2.03	000 2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Pelaku Usaha	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Pelaku Usaha	50.598.122
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.052.909.692				5.041.228.454
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia		74 Persen	538.877.200			75 Persen	479.157.183
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian		80 Persen	448.050.000			100 Persen	209.738.764
3	27	02	2.01	000 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	373.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Laporan	104.393.633
3	27	02	2.01	000 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	105.345.131
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persentase peternak yang dibina		40 Persen	57.675.700			50 Persen	173.618.537

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Kewenangan Kabupaten/Kota								
3	27	02	2.02	000 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	57.675.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	173.618.537
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar		100 Persen	28.409.500			100 Persen	89.542.820
3	27	02	2.03	000 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	19.587.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	66.542.820
3	27	02	2.03	000 2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	8.821.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	23.000.000
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister		65 Persen	4.742.000			70 Persen	6.257.062
3	27	02	2.04	000 1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.742.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	6.257.062
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik		52.42 Persen	675.837.292			52,94 Persen	1.989.364.412

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia		100 Persen	98.050.000			100 Persen	99.775.681
3	27	03	2.01	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	84.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Laporan	6.655.869
3	27	03	2.01	001 6	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	13.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	93.119.812
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia		70.33 Persen	577.787.292			70,05 Persen	1.889.588.731
						Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan		80 Persen				90 Persen	
3	27	03	2.02	000 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	4.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Unit	150.000.000
3	27	03	2.02	000 6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	98.827.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Unit	236.488.896
3	27	03	2.02	000 8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	85.247.592	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	11.230.614
3	27	03	2.02	001 0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kota Blitar, Semua	3 Unit	203.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	1.093.955.625

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Kecamatan, Semua Kel/Desa						
3	27	03	2.02	001 5	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	185.012.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	397.913.596
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		48 Persen	241.123.700			52 Persen	341.390.959
						Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani		100 Persen				100 Persen	
						Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar		61.11 Persen				72,22 Persen	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis		0 Angka	49.134.800			0 Angka	78.418.386
3	27	04	2.01	000 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Orang	49.134.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang	78.418.386
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia		69 Persen	153.696.300			71 Persen	229.300.011

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	27	04	2.03	000 1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	26.812.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	38.669.387
3	27	04	2.03	000 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	126.884.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	190.630.624
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina		44 Persen	27.264.700			48 Persen	27.840.928
3	27	04	2.04	000 4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.811.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	9.799.047
3	27	04	2.04	000 5	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit Usaha	18.453.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit Usaha	18.041.881
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana		100 Persen	11.027.900			100 Persen	5.831.634
3	27	04	2.05	000 3	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	11.027.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Unit	5.831.634
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur		100 Persen	17.675.000			100 Persen	111.206.667
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT		13 Persen	17.675.000			13 Persen	111.206.667

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								
3	27	05	2.01	000 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Ha	17.675.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Ha	111.206.667
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis		50 Persen	18.124.300			58,33 Persen	93.730.592
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis		20 unit	7.649.400			30 unit	82.707.300
3	27	06	2.01	000 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.649.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	82.707.300
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di dikeluarkan		1 Rekomendasi	5.524.300			1 rekomendasi	5.688.921
3	27	06	2.02	000 2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	5.524.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	5.688.921

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan		1 Rekomendasi	4.950.600			1 rekomendasi	5.334.371
3	27	06	2.03	000 2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.950.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	5.334.371
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital		33.33 Persen	1.561.272.200			38,89 Persen	2.026.378.641
						Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis		19.05 Persen				23,81 Persen	
						Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani		0.93 Persen				0,93 Persen	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM		45 Persen	1.561.272.200			50 Persen	2.026.378.641
3	27	07	2.01	000 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	6.324.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	66.782.970
3	27	07	2.01	000 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Unit	1.550.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		21 Unit	1.953.530.168
3	27	07	2.01	000 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	4.947.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Unit	6.065.503

Sedangkan tindak lanjut untuk langkah perbaikan LKJIP 2023 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Peningkatan produksi tanaman pangan lebih difokuskan pada peningkatan daya dukung / kapasitas lahan pertanian.	Pelatihan pembuatan Pupuk Organik dan pendampingan PTPS	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
4	Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja.	Pengembangan aplikasi data pangan, pertanian dan perikanan	- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota - Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk perikanan serta memperluas jangkauan pemasaran	Pelatihan pemasaran hasil perikanan dengan pemanfaatan platform digital	- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan - Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil - Sub Kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
		Pelatihan pengemasan hasil olahan perikanan	
6	Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian serta memperluas jangkauan pemasaran	Pelatihan diversifikasi produk hasil pertanian	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
7	Peningkatan diversifikasi komoditas pertanian	Pelatihan budidaya tanaman hias di Kelompok Wanita Tani (KWT)	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa

BAB V

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar pada Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangannya terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
 - a. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2025;
 - b. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar tahun 2025;
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025;
 - d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota Blitar.